

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, karena melalui pendidikan kita bisa mengarahkan, menuntun dan membina insan-insan yang cerdas, berakhlak mulia serta mandiri. Masalah pendidikan adalah topik yang tidak ada habisnya dibicarakan di Indonesia. Setelah sekian lama pendidikan di Indonesia berjalan, meskipun mengalami banyak kemajuan, masih saja menyisakan banyak permasalahan yang justru lebih esensial dari sekedar peningkatan sekolah formal di Indonesia.

Pendidikan dikemukakan dalam UU No.20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Berdasarkan Undang-Undang di atas, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang diwujudkan melalui proses pembelajaran.

Diharapkan melalui proses pendidikan, dapat mengembangkan potensi

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafiko, 2009), Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

yang ada pada siswa. Hal tersebut akan membantu tercapainya tujuan pendidikan di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pendidikan, pemerintah dan masyarakat berusaha menyelenggarakan pendidikan yang pada prinsipnya merupakan sarana yang mendasar untuk memperoleh kelangsungan hidup manusia, dan merupakan salah satu infrastruktur untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam proses pendidikan secara berkesinambungan.² Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa, karena melalui pendidikan kita bisa mengarahkan, menuntun dan membina insan-insan yang cerdas, berakhlak mulia serta mandiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nahl Ayat 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”³

Jadi, siswa sebagai warga negara perlu dipersiapkan sejak dini agar bisa berperan dalam kehidupan berbangsa. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-

² Susan Octarina, *Pengaruh Media Video Berbasis Nilai dalam Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Desposition) Siswa Pada Pembelajaran PKn*, (Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hal.1

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000).

masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya, memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berpikir kritis, kreatif dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan masyarakat yang baik. Pencapaian sekolah bermutu dimulai dari dikembangkannya budaya misalnya kebijakan kepala sekolah tentang pentingnya semua guru meningkatkan kapasitas diri melalui jalur formal maupun nonformal, dibentuknya *team teaching* yang berfungsi untuk saling asah, asih, dan asuh antarteman sebaya guru-guru.⁴ Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku di kalangan siswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun dalam pergaulan antar bangsa. Bangsa yang santun merupakan salah satu ciri identitas bangsa Indonesia. Kesantunan berupa menjadi manusia yang religius, adil, beradab, bersatu, demokratis, untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa. Paradigma ini tidak tumbuh dengan sendirinya pada setiap generasi penerus bangsa. Salah satu bentuknya yaitu dengan membangun karakter bangsa (*nation character building*) agar tegak dan tegar menghadapi pergolakan dunia, lebih-lebih pada era

⁴ Nur Kholis dkk., “Mutu Sekolah Dan Budaya Partisipasi Stakeholders : Studi Fenomenologi di Sekolah Konfesional MIN Tegalasri Wlingi Blitar”, dalam <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/viewFile/2639/2194>, (IAIN Tulungagung, Universitas Negeri Yogyakarta), diakses pada 14 Juli 2020.

globalisasi.⁵ Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah memegang peranan penting dalam peningkatan watak atau karakter siswa sebagai warga negara muda. Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 37, Pendidikan Kewarganegaraan ditempatkan sebagai mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi. Pada bagian penjelasan di dalamnya dipertegas lagi bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”⁶

Sehubungan dengan hal itu, Suryadi dan Somardi dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial karya Deny Setiawan mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada tiga komponen pengembangan, yaitu (1) *civic knowledge*, (2) *civic skills*, dan (3) *civic disposition*. Inilah pengertian “warga negara yang baik” yang diharapkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan.⁷ Dengan memperhatikan tiga komponen/dimensi di atas yang berorientasi pada sistem kehidupan global maka materi Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat komponen-komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kepribadian warga negara, tidak saja fungsional dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam era kehidupan global.

⁵ Sri Harini Dwiyatmi dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal.3

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafiko, 2009), Pasal 37.

⁷ Deny Setiawan, Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, “Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial”, Vol.6 No.2, 2014

Civic Knowledge (Pengetahuan Kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. *Civic Skill* (Kecapakan Kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan. *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. ⁸ Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) bisa disejajarkan dengan domain atau ranah kognitif, keterampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) sejajar dengan domain atau ranah psikomotorik, sedangkan sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sejajar dengan domain atau ranah afektif.⁹

Pembelajaran PKn diwarnai kuat oleh orientasi pada pencapaian target kurikulum. Menjadikan belajar PKn terpusat pada satu arah dan kurang memberikan kesempatan aktif siswa untuk berpikir. Membelajarkan ranah kognitif dengan cara memberi banyak informasi konsep-konsep PKn. Akibatnya mata pelajaran PKn oleh siswa cenderung dianggap sebagai pelajaran hafalan. Kecenderungan pembelajaran PKn yang hanya berorientasi pada pemahaman akan *civic knowledge* perlu diubah, apalagi sebatas mengajarkan konsep-konsep keilmuan PKn yang sifatnya hafalan.

⁸ Theodorus Pangalila, *Peningkatan Civic Disposition Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*, "Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan", Vol.7 No.1, 2017, hal.93

⁹ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi dan Penilaian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 107

Guru dalam dunia pendidikan mempunyai peranan yang kompleks dalam kehidupan peserta didiknya. Peran guru sebagai pendidik adalah menanamkan sikap, nilai, dan perilaku melalui keteladanan sikap dan perilaku diri sendiri atau yang dipetik dari orang lain untuk ditanamkan kepada anak didik. Guru sebagai pendidik adalah sebagai pribadi yang memberikan bantuan, dorongan, pengawasan, dan pembinaan dalam mendisiplinkan peserta didik agar menjadi patuh terhadap aturan sekolah dan norma dalam masyarakat. Guru dalam rangka mendidik harus mampu menjadikan peserta didik yang diampunya menjadi pribadi yang berbudi pekerti baik.¹⁰

Tahun-tahun terakhir ini, dalam praktik pendidikan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan telah mengalami degradasi yang mengawatirkan, bahkan nilai-nilai kearifan lokal telah tergerus oleh arus pendidikan global. Kondisi ini berakibat menipisnya tatakrama, etika, dan kreativitas anak bangsa. Dunia pendidikan dianggap tidak mampu melahirkan lulusan yang berkualitas, yakni manusia Indonesia seutuhnya seperti cita-cita luhur bangsa yang diamanatkan dalam undang-undang pendidikan Nasional.

Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti ketika mengikuti mata kuliah Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan, contoh

¹⁰ Hana Mukhofiyatun Nisa' dan Nur Kholis, "Peran Guru PAI dalam Menciptakan Budaya Belajar Efektif", Rahmatan Lil Alamin Journal of Peace Education and Islamic Studies ISSN (Print) 2622-089X ISSN (Online) 2622-0903 Vol. 2 No. 1 Juni 2019 dalam <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JRLA/article/download/315/191>, Pascasarjana IAIN Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan IAIN Tulungagung, diakses pada 14 Juli 2020.

implementasi atau penerapan sikap dan keterampilan kewarganegaraan masih menjadi perdebatan antar mahasiswa yang belum menemukan titik temu. Peneliti memilih MIN 3 Tulungagung sebagai lokasi penelitian karena MIN 3 Tulungagung merupakan sekolah negeri yang meraih banyak prestasi walaupun berada di pedalaman atau jauh dari perkotaan. Peneliti ingin membuktikan apakah walaupun mereka berada di wilayah pedesaan, MIN 3 Tulungagung masih menjunjung tinggi nilai-nilai kewarganegaraan terutama kompetensi kewarganegaraan. Dalam observasi awal yang telah dilakukan, peneliti membuktikan adanya degradasi moral yang semakin tergerus dan masalah-masalah tentang kurangnya penanaman kompetensi kewarganegaraan dalam dunia pendidikan.

Keadaan demikian dirasakan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai salah satu penghambat tercapainya tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu secara umum tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik yakni warga negara yang memiliki kecerdasan, rasa bangga dan tanggung jawab serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Menyoroti permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana kurangnya penanaman kompetensi kewarganegaraan yang dimiliki siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana

¹¹ Susan Octarina, *Pengaruh Media Video Berbasis Nilai dalam...*, hal. 4

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan menjadi lebih baik.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan selain mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, juga bertugas mengembangkan warga negara muda menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.¹² Theodorus Pangalila mengemukakan bahwa :¹³

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam “*nation and character building*”.

Berdasarkan penjelasan di atas, peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat relevan. Maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk secara khusus meneliti tentang “Penanaman Kompetensi Kewarganegaraan melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Siswa di MIN 3 Tulungagung”.

¹² Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014), hal.20

¹³ Theodorus Pangalila, *Peningkatan Civic Disposition Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*, “Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan”, Vol.7 No.1, 2017, hal.92

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penanaman *Civic Knowledge* melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap siswa di MIN 3 Tulungagung?
2. Bagaimana penanaman *Civic Disposition* melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap siswa di MIN 3 Tulungagung?
3. Bagaimana penanaman *Civic Skill* melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap siswa di MIN 3 Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penanaman *Civic Knowledge* melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap siswa di MIN 3 Tulungagung tahun ajaran 2019/2020..
2. Untuk mendeskripsikan penanaman *Civic Disposition* melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap siswa di MIN 3 Tulungagung tahun ajaran 2019/2020..
3. Untuk mendeskripsikan penanaman *Civic Skill* melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap siswa di MIN 3 Tulungagung tahun ajaran 2019/2020..

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori dan ilmu pengetahuan teoritis pada umumnya. Selain

itu, dapat pula menjembatani teori dan praktik mengenai penanaman Kompetensi Kewarganegaraan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, serta pengembangan karakter siswa sehingga teori yang bersifat konseptual menjadi hal yang bersifat riil dan praktis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengatasi dan mengevaluasi permasalahan dalam lembaga pendidikan terkait permasalahan yang telah ditemukan dalam penelitian.
- b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menanamkan kompetensi kewarganegaraan pada diri peserta didik, agar dapat memberikan kontribusi yang nyata dan suri teladan bagi peserta didik.
- c. Bagi peserta didik, dengan adanya penelitian ini diharapkan kompetensi kewarganegaraan lebih meningkat dan peserta didik lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat melaksanakan kajian yang lebih mendalam lagi, sehingga mampu mengembangkan apa yang telah ditemukan oleh peneliti selanjutnya atau bahkan jauh menemukan temuan baru lagi.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Penanaman

Penanaman adalah proses perbuatan atau cara menanamkan.¹⁴ Sedangkan secara operasional, penanaman adalah suatu tindakan atau perilaku untuk menanamkan suatu hal. Penanaman merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan seseorang dengan tujuan dapat mempengaruhi kepercayaan, kepribadian, maupun tingkah laku individu.

b. Kompetensi Kewarganegaraan

Kompetensi yang berasal dari kata *competence* menurut Spencer diartikan sebagai karakteristik mendasar dari seseorang yang berhubungan dengan timbal balik dengan suatu kriteria efektif dan atau kecakapan terbaik seseorang dalam suatu pekerjaan atau keadaan. Hal ini bahwa kompetensi tersebut cukup mendalam dan bertahan lama sebagai bagian dari kepribadian seseorang sehingga dapat digunakan untuk memprediksi perilaku seseorang ketika berhadapan dengan berbagai situasi dan masalah.

Komponen utama pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) yang perlu diajarkan kepada peserta didik mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap

¹⁴WJS. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 895

watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Pembagian atas ketiga domain ini tampak kesejajarannya dengan tiga ranah yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) bisa disejajarkan dengan domain atas ranah kognitif, keterampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) sejajar dengan domain atau ranah psikomotorik, sedangkan sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sejajar dengan domain atau ranah afektif.

c. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembelajaran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan orang untuk belajar. Kemudian, belajar sendiri berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, latihan, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.¹⁵ Jadi, pada hakikatnya pembelajaran adalah proses menjadikan orang agar mau belajar dan mampu (kompeten) belajar melalui berbagai pengalamannya agar tingkah lakunya dapat berubah menjadi lebih baik lagi.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai

¹⁵ Novan Ardy Wiyani, *Desain Pembelajaran Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal.19

dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.¹⁶

2. Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Penanaman Kompetensi Kewarganegaraan Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Siswa di MIN 3 Tulungagung” adalah suatu usaha membentuk pengetahuan kewarganegaraan peserta didik menjadi lebih baik melalui muatan pelajaran PKn. Adapun kompetensi kewarganegaraan yang dimaksud ialah pengetahuan, sikap maupun keterampilan individu dengan lingkungan, masyarakat sekitar, dan negara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di sini bertujuan untuk memudahkan jalannya pembahasan terhadap suatu maksud yang terkandung, sehingga uraian-uraian dapat diikuti dan dapat dipahami secara sistematis. Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari enam bab, masing-masing disusun secara rinci dan sistematis sebagai berikut.

Bab I merupakan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014), hal.6

Bab II memuat kajian pustaka yang memaparkan tinjauan tentang kompetensi kewarganegaraan dan tinjauan tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang menjelaskan tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV memaparkan data hasil penelitian di lokasi MIN 3 Tulungagung. Sub bab kedua memaparkan temuan hasil penelitian di MIN 3 Tulungagung. Sub bab ketiga memaparkan analisis data.

Bab V membahas hasil penelitian terkait tentang upaya meningkatkan kompetensi kewarganegaraan di MIN 3 Tulungagung. Berisi tentang interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

Bab VI adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi yang meliputi implikasi teortis dan implikasi praktis, dan saran-saran. Bagian akhir dari skripsi ini berisikan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran yang berhubungan dan mendukung isi skripsi.